



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT Nomor : 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
Gedung Lab. Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Bina Widya Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru – 28293
Telp. 08527407555 E-mail : maksunri@yahoo.co.id**

**SILABUS MATA AJAR
PERPAJAKAN
(3 SKS)**

Deskripsi dan Tujuan

Mata ajaran ini bertujuan untuk membahas berbagai peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Pembahasan tidak hanya menekankan pada penguasaan peraturan perpajakan namun juga menekankan bagaimana aplikasi peraturan tersebut dalam perusahaan. Peserta diharapkan dapat melakukan analisis terhadap transaksi perusahaan yang terkait dengan perpajakan dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Peraturan perpajakan secara langsung akan mempengaruhi kondisi perusahaan, sehingga akan mempengaruhi keputusan bisnis yang diambil perusahaan. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam melakukan audit atas transaksi dan akun yang terkait dengan perpajakan. Dalam beberapa pertemuan akan dibahas mengenai aspek etika perpajakan. Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif adalah agar peserta didik:

1. Memahami aplikasi pajak, baik dari sisi pelaporan pajak dan penyajian pajak dalam laporan keuangan.
2. Memahami pengaruh pajak dalam penyajian laporan keuangan.
3. Memahami dampak peraturan pajak terhadap keputusan bisnis.
4. Memahami pentingnya etika dalam perpajakan.

Metode Pembelajaran

Fokus pengajaran adalah pada kemampuan dan kemauan peserta didik untuk belajar secara mandiri dalam memahami konsep-konsep yang ada dalam silabus dan buku referensi yang diberikan dan pengetahuan lainnya. Pengajaran dilakukan dengan pendekatan *cases based learning* yaitu dengan menjelaskan konsep melalui kasus. Peserta dimotivasi untuk aktif dalam mencari dan menggali Peraturan Perpajakan yang terkait agar terbiasa dalam mendapatkan sumber hukum yang terbaru dalam menyelesaikan kasus pajak.

Pengajaran dimulai dengan penyampaian materi pokok seperti yang tercantum dalam sub pokok bahasan. Waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi antara 30 – 60 menit. Sedangkan untuk waktu sisanya digunakan untuk melakukan pembahasan kasus dan kuis. Staf pengajar dapat mencari kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Mahasiswa membuat makalah yang berisikan bahasan atas kasus tersebut kemudian mempresentasikan hasil pembahasannya di depan kelas. Kelompok lain harus membahas kasus tersebut dan mengumpulkannya. Dengan demikian maka seluruh peserta dapat berpartisipasi dalam diskusi.

Referensi Wajib

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB) dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan peraturan pelaksanaannya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT Nomor : 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
Gedung Lab. Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Bina Widya Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru – 28293
Telp. 08527407555 E-mail : maksunri@yahoo.co.id

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB) dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57 Tahun 2009)
- Standar Akuntansi Keuangan, **Ikatan Akuntan Indonesia**. (SAK).
 - CD Tax Guide.
- Rachmanto Surachmat, **Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Sebuah Pengantar** (RCH)
 - Gunadi, **Pajak Internasional** Lembaga Penerbit UI. (G1).
 - John Hutagaol, **Pemahaman Praktis: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda**. (JH).
- Waluyo, **Perpajakan Indonesia** Buku 1 dan 2, Penerbit Salemba Empat, 2007. (W).
- Zain, Muhammad, **Manajemen Perpajakan**, Salemba Empat (Z).

Referensi Pendukung

- Harnanto, **Akuntansi Perpajakan**.
- John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, **Kapita Selekt Perpajakan**, Salemba Empat, 2006. (JDD).
- Mardiasmo, **Perpajakan** (M).
- **OECD**, *Model Tax Convention on Income and on Capital*, 2005. (OECD).
- Rachmanto Surahmat, **Bunga Rampai Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, 2007.
- Siti Resmi, **Perpajakan** buku 1 dan 2, Salemba Empat (SR).
- Sukardji, Untung, **Pajak Pertambahan Nilai**.
- **Jurnal Perpajakan Indonesia**.
- **Majalah Berita Pajak**.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran lebih menekankan pada aspek proses tidak hanya hasil akhir. Sehingga proses pemantauan setiap pertemuan, interaksi mahasiswa selama di kelas dan pembuatan tugas kelompok merupakan aspek yang penting dalam evaluasi selain penilaian hasil akhir melalui evaluasi. Berikut ini adalah beberapa alat evaluasi yang dapat digunakan yaitu :

Diskusi dan Partisipasi Kelas 10%
Penyajian dan Penyelesaian Kasus 20%
Kuis 20%
Ujian Tengah Semester 25%
Ujian Akhir Semester 25%

PERTEMUAN TOPIK BAHASAN BAHAN BACAAN

SESI	TOPIK BAHASAN	REFERENSI
------	---------------	-----------



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT Nomor : 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
Gedung Lab. Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Bina Widya Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru – 28293
Telp. 08527407555 E-mail : maksunri@yahoo.co.id

	Pajak Penghasilan untuk transaksi khusus 1. PPh pasal 4 ayat 2 2. Kredit pajak luar negeri (PPh 24) 3. Ketentuan Khusus PPh atas transaksi / industri tertentu misal: <ul style="list-style-type: none">• Penghasilan modal ventura• Transaksi pasar modal• Penghasilan yang dibebankan pada keuangan negara/daerah• Konstruksi• Pajak Penghasilan atas Dana Pensiun• Restrukturisasi utang• Holding Company, Merger dan Akuisisi• Pelayaran, Penerbangan, Pengeboran dan• Dana Pensiun• Derivatif	UU Pajak Penghasilan Peraturan pelaksana UU PPh Kasus Penerapan pajak atas penghasilan, transaksi atau industri khusus Kuis
5.	Rekonsiliasi Fiskal 1. Rekonsiliasi Laba Komersial dengan Laba Fiskal 2. Beda Permanen dan Temporer 3. Perhitungan pajak terhutang 4. Kredit Pajak 5. Pajak akhir tahun (PPh 28 dan PPh 29)	UU Pajak Penghasilan Peraturan Pelaksana UU Pajak Penghasilan Kasus : Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan pajak akhir tahun Kuis
6.	Penyelesaian pajak akhir tahun, Angsuran Pajak dan Pajak dalam Laporan Keuangan 1. Cicilan pajak (PPh 25) 2. Pencatatan akuntansi: <ul style="list-style-type: none">• Angsuran pajak• Kredit pajak• Pajak akhir tahun• Beban pajak• Pajak tangguhan 3. Etika dalam pelaporan Pajak	UU Pajak Penghasilan Peraturan Pelaksana UU Pajak Penghasilan PSAK 46 Kasus perhitungan pajak dan pengisian SPT tahunan PPh Badan dan penyajian pajak dalam laporan tahunan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT Nomor : 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
 Gedung Lab. Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Bina Widya Km 12,5
 Simpang Baru Pekanbaru – 28293
 Telp. 08527407555 E-mail : maksiumri@yahoo.co.id

7.	Pajak dipotong/dipungut pihak Lain (withholding tax) – 21, 22, 23, 26 1. Pemotong Pajak 2. Penerima penghasilan yang dipotong 3. Obyek Pajak 4. Pengurangan yang diperbolehkan 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak 6. Penghitungan Pph 21, 22, 23 dan 26 7. Penghasilan yang dikenakan PPh Final 8. Pencatatan akuntansi atas pajak dipotong/dipungut	UU Pajak Penghasilan Peraturan pelaksana PPh Kasus Perhitungan PPh 21 dan 26 Kuis
8. UJIAN TENGAH SEMESTER		
9 & 10	Konsep Dasar PPN dan PPnBM 1. Karakteristik dan Mekanisme Pengadaan PPN dan PPnBM 2. Objek pajak dan yang dikecualikan 3. Pengusaha Kena Pajak 4. Penyerahan dan Bukan Penyerahan 5. Barang dan Jasa Kena Pajak 6. Daerah Pabean dan Kawasan Berikat 7. Saat dan tempat terutang 8. Faktur pajak, nota retur 9. Dasar Pengenaan Pajak 10. Hubungan istimewa dan kaitannya dengan DPP 11. Penghitungan dan pelaporan 12. Kredit pajak masukan 13. Pencatatan transaksi PPN dan PPnBM	UU PPN dan PPnBM Peraturan Pelaksana UU PPN dan PPnBM Kasus perhitungan PPN dan penentuan utang PPN akhir masa Kuis
11.	Ketentuan Khusus PPN dan PPnBM 1. Fasilitas khusus di bidang PPN/PPnBM: tidak dipungut, dibebaskan 2. PPN dan PPnBM atas penyerahan kepada pemungut pajak 3. Ketentuan atas Transaksi/ Industri Khusus : <ul style="list-style-type: none"> • Apartemen, real estate dan konstruksi • Emas • Transaksi syariah • Pedagang Eceran (Retail) • Leasing • Kegiatan membangun sendiri 	UU PPN dan PPnBM Peraturan Pelaksana UU PPN dan PPnBM Kasus : Perhitungan dan pelaporan PPN pada industri khusus Kuis



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT Nomor : 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)
 Gedung Lab. Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Bina Widya Km 12,5
 Simpang Baru Pekanbaru – 28293
 Telp. 08527407555 E-mail : maksunri@yahoo.co.id

12.	<p>Pajak Daerah dan Pajak lainnya (Materai, PBB dan BPHTB)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak dan Retribusi daerah 2. Peranan Pajak Daerah dalam Pembangunan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa contoh pajak daerah • Mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak daerah 3. Subyek, obyek dan perhitungan PBB, BPHTB dan Bea Materai 	<p>UU PBB UU Bea Material UU BPHTB UU Dokumen Negara UU Pajak Daerah dan Retribusi Kasus : Pajak Daerah Kuis</p>
13.	<p>Konsep Dasar Pajak Internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar Perpajakan Internasional 2. Pemajakan transaksi lintas negara 3. Konsep <i>juridical versus economic double taxation</i> 4. Sumber hukum perpajakan internasional 5. Prinsip non diskriminasi 6. Konsep <i>Anti-tax avoidance</i> 7. Pengertian dan tujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) 	<p>OECD JH Z RCH Kasus : Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda</p>
14.	<p>Penghindaran pajak berganda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax Treaty</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Pemajakan Atas <i>Passive Income</i> • Pemajakan Atas <i>Dependent dan Independent Personal Services</i> 2. Konsep BUT (<i>Permanent Establishment</i>) 3. <i>Transfer pricing</i> 4. <i>Treaty Shopping</i> 5. Aplikasi pajak internasional dalam perusahaan multinasional 	<p>OECD JH Z RCH Kasus : <i>Transfer Pricing</i></p>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
AKREDITASI A (SK BAN-PT No. 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019)**
Gedung F Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus UNRI Gobah
Jalan Pattimura, Pekanbaru – 28131
Telp/WA. 082216254141 E-mail : maks@unri.ac.id

15.	Strategi Perencanaan dan Manajemen Pajak Perusahaan 1. Konsep dasar strategi dan perencanaan pajak 2. Penghindaran pajak dan penyelundupan pajak 3. Teknik dasar manajemen pajak dan perencanaan pajak misal optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, efisiensi administrasi 4. Berapa contoh keputusan manajemen : <ul style="list-style-type: none">• Pemberian dalam bentuk natura• Biaya setelah pajak• Pendanaan investasi 5. Pengaruh pencatatan dan sistem akuntansi dalam manajemen dan perencanaan pajak 6. Etika dalam manajemen pajak	Z Kasus : Perencanaan dan Manajemen Pajak
16. UJIAN AKHIR SEMESTER		